

Peran Kader Posyandu dalam Mencegah Kasus Stunting di Kelurahan Ngijo Kota Semarang

Nisa Nugraheni^{1✉}, Abdul Malik²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang

Email nisangr.pnf@students.unnes.ac.id, abdul.malik@mail.unnes.ac.id

Article history:

Received: 2023-04-10

Revised: 2023-0-16

Accepted: 2023-04-28

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kader dalam pencegahan kasus stunting di Kelurahan Ngijo, dan mendeskripsikan mengenai hambatan dan solusi dalam pencegahan kasus stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terdapat beberapa peran kader posyandu berkaitan dengan cara pencegahan kasus stunting di Kelurahan Ngijo. Terdapat empat peran kader posyandu dalam mencegah kasus stunting, yaitu: 1) pelayan kesehatan, 2) penyuluh kesehatan, 3) penggerak dan pemberdayaan masyarakat, dan 4) pemantauan kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan peran, kader posyandu didampingi oleh petugas lapangan atau petugas kesehatan dari Puskesmas Sekaran. Kader posyandu diharapkan dapat menjadi ujungtombak dalam pencegahan kasus stunting. Kader posyandu merupakan orang yang dianggap dekat dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan stunting. Selain itu, terdapat juga beberapa hambatan dalam pelaksanaan pencegahan kasus stunting, diantaranya adalah kurangnya motivasi kader, kurangnya sarana dan prasarana, dan pendanaan.

Kata Kunci: Stunting, Kader Posyandu, Peran

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of cadres in preventing stunting cases in the Ngijo Village, and to describe the obstacles and solutions in preventing stunting cases. This study uses a qualitative method. Data validity checking technique uses source triangulation. Data analysis techniques in this study used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study revealed several roles of posyandu cadres related to how to prevent stunting cases in the Ngijo Village. There are four roles of posyandu cadres in preventing stunting cases, namely: 1) health service, 2) health extension, 3) community mobilization and empowerment, and 4) health monitoring. In carrying out their duties and roles, posyandu cadres are accompanied by field officers or health workers from the Sekaran Health Center. Posyandu cadres are expected to be the spearhead in preventing stunting cases. Posyandu cadres are people who are considered close to the community, so they are expected to be able to convey information related to stunting. In addition, there are also several obstacles in implementing stunting prevention, including the lack of motivation of cadres, lack of facilities and infrastructure, and funding.

PENDAHULUAN

Stunting atau kerdil merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting merupakan masalah gizi kronis dalam kurun waktu cukup lama yang disebabkan karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak balita (Adistie, 2018). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 dalam Cahyati (2019) Tentang standar antropometri penilaian status gizi anak, stunting atau pendek merupakan status gizi anak yang berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan z-score kurang dari -2 SD (Standar Deviasi).

Menurut WHO, Indonesia berada pada peringkat ketiga dengan kasus stunting tertinggi di Asia. Berdasarkan Riset Dasar (Riskesdas) tahun 2007 prevalensi stunting di Indonesia mencapai 36,8%, kemudian pada tahun 2010 sebesar 35,6%, pada tahun 2013 prevalensi stunting naik menjadi 37,2%, dan pada tahun 2018 sebesar 30,8% (Cahyati, 2019). Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019 prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 27,67% (Kementerian Kesehatan, 2019). Hal ini berarti, prevalensi stunting di Indonesia turun sebesar 3,13%. Namun, WHO telah menetapkan standar maksimal prevalensi stunting untuk negara berkembang yaitu dibawah 20%, yang artinya Indonesia belum dapat mencapai target standar yang telah ditetapkan oleh WHO.

Data Pemantauan Status Gizi (PSG) di Jawa Tengah pada tahun 2015 sampai 2018, Jawa Tengah masih memiliki prevalensi stunting diatas 20%. Pada tahun 2015 prevalensi stunting di Jawa Tengah sebesar 24,8%, tahun 2016 sebesar 23,6%, dan pada tahun 2017 naik menjadi sebesar 28,5%, tahun 2018 sebesar 28%. Berdasarkan data diatas, Jawa Tengah masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO (Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2018).

Berdasarkan data hasil pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita (operasi timbang) di Kota Semarang, pada tahun 2017 prevalensi stunting di Kota Semarang sebesar 2,63% yang terdiri dari 0,26% sangat pendek dan 2,37% pendek, dengan jumlah balita stunting sebesar 2.690 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 2,73% yang terdiri dari 0,26% sangat pendek dan 2,47% pendek, dengan jumlah balita stunting sebesar 2.707 jiwa (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2018). Apabila merujuk dari data diatas, prevalensi stunting di Kota Semarang sudah menunjukkan hasil yang baik, karena berada di bawah 20% (standar WHO). Hal ini tentu masih memerlukan usaha yang optimal agar pencegahan stunting dapat berjalan dengan maksimal.

Masalah stunting menjadi masalah yang besar, karena pada anak stunting bukan hanya pertumbuhan fisiknya saja yang terganggu, tetapi juga pertumbuhan otaknya. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan penurunan produktifitas. Kondisi tersebut akan berdampak pada produktifitas sumber daya manusia, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesenjangan (Materi Penanggulangan Stunting, 2018).

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting atau kekerdilan yaitu: (1) faktor gizi buruk ibu hamil dan balita, (2) kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu sebelum dan saat hamil serta



setelah ibu melahirkan, (3) terbatasnya akses layanan kesehatan ibu dan anak, (4) kurangnya akses makanan bergizi, (5) serta masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi lingkungan (Rizky, 2019).

Penanggulangan stunting memerlukan kerjasama antara orangtua, pemerintah, dan masyarakat. Orangtua mendapatkan peran utama dalam penanganan stunting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan makanan yang bergizi bagi anak. Selain penyediaan gizi, diperlukan juga penyediaan sanitasi yang memadai. Penanganan stunting merupakan pembangunan skala prioritas pembangunan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan, sehingga pada tahun 2018 diluncurkan Gerakan Nasional Penanganan Stunting (Megawati, 2019). Program ini difokuskan dan di prioritaskan pada penanganan gizi spesifik pada 1000 hari pertama kehidupan sampai anak berusia 6 tahun. Pemerintah terus berupaya dalam penanganan stunting, salah satunya dengan memberdayakan posyandu. Selain itu, pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai program kegiatan. Salah satunya dengan bekerjasama dengan BKKBN dalam penanganan masalah gizi kronis. Upaya-upaya yang dilakukan dengan merancang berbagai program dan mengimplementasikan program yang melibatkan kader-kader di daerah (Kosasih, 2020).

Pemanfaatan posyandu dalam mengatasi stunting sesuai dengan visi Kementerian Kesehatan yaitu menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dan dengan misi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan madani (Kementerian Kesehatan RI, 2012). Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu, bayi, dan anak (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Masyarakat sasaran posyandu adalah target intervensi gizi spesifik dalam penanganan stunting. Posyandu memberikan pelayanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Pelayanan-pelayanan dalam posyandu mencakup pemantauan kesehatan ibu dan anak, pemberian kapsul vitamin A, pemberian obat cacing, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan konseling keluarga berencana. Dalam pelaksanaannya, posyandu dibantu oleh petugas yang disebut kader posyandu.

Kader posyandu merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan kegiatan posyandu. Kader posyandu memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan posyandu. Dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, kader dituntut untuk aktif dalam kegiatan promotif dan preventif, serta motivator bagi warga masyarakat. Peranan kader sangat penting karena kader bertanggung jawab dalam pelaksanaan program posyandu, bila kader tidak aktif maka pelaksanaan posyandu juga akan menjadi tidak lancar dan akibatnya status gizi bayi atau balita tidak dapat dideteksi secara dini dengan jelas. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program posyandu khususnya dalam memantau tumbuh kembang balita. Kader ikut berperan dalam tumbuh anak dan kesehatan ibu, sebab melalui kader para ibu mendapatkan informasi kesehatan lebih dulu (Sengkey, 2015).

Merujuk dari realitas diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran kader posyandu dalam penanganan kasus stunting dengan penelitian yang berjudul "Peran Kader Posyandu dalam Menangani Kasus Stunting di Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang".

METODE PENELITIAN (Calisto MT Bold 10 pt)

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilaksanakan dengan melibatkan metode-metode yang ada. Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik yang berarti alamiah. Penggunaan metode penelitian diharapkan memperoleh hasil penelitian yang dapat menemukan jawaban permasalahan dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Sugiyono (2015:1) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penekanan pada makna ditunjukkan agar peneliti mendapatkan data yang sebenarnya, data yang pasti menjadi suatu nilai di balik data yang konkret. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini mendeskripsikan secara intensif, peneliti ikutberpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan. Sehingga akan terungkap fenomena mengenai realita sosial, aktualisasi, maupun sasaran penelitian dan dapat memperoleh data yang mendalam terkait peran kader posyandu dalam mencegah kasus stunting di Kelurahan Ngijo Kota Semarang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung oleh peneliti. Subjek penelitian berjumlah 4 orang terdiri dari 1 Petugas Gizi Puskesmas Sekaran, dan 3 Kader Posyandu Kelurahan Ngijo.

Keabsahan data pada penelitian kualitatif menggunakan triangulasi sumber untuk menyelaraskan dan mengecek data agar dapat dipastikan kepercayaan data dan dapat dipastikan valid atau tidaknya suatu data. Peneliti memeriksa keabsahan data dari jawaban hasil wawancara, hasil data yang diperoleh selama penelitian tidak bisa dirata-ratakan namun dideskripsikan antara subjek peneliti, terkait pandangan yang sama atau berbeda dari hasil maupun yang spesifik dari sumber data yang didapatkan. Sehingga penggunaan triangulasi sumber ini akan mampu memberikan kepercayaan informasi yang didapatkan. Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman memaparkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif menggunakan 3 macam langkah kegiatan yang dilakukan terus menerus sampai tuntas dengan langkah-langkahnya yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Stunting merupakan kondisi dimana panjang atau tinggi badan dan berat badan yang tidak sesuai dengan standar umurnya. Stunting merupakan masalah gizi yang bersifat kronis karena menjadi salah satu keadaan malnutrisi yang memiliki hubungan dengan tidak tercukupinya gizi di masa lampau (Fatimah, 2021). Kondisi stunting menjadi kondisi yang sulit disadari dalam masyarakat kebiasaan tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan gizi balita. Menurut Febrina (2017) Balita dengan riwayat stunting dapat menyebabkan penurunan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa. Selain hal tersebut juga dapat mempengaruhi pada bidang ekonomi, yaitu peningkatan pengeluaran biaya kesehatan.

Dalam upaya pencegahan kasus stunting, peran kader posyandu sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini. Peran kader posyandu merupakan bagian vital dalam meningkat partisipasi peningkatan gizi pada ibu dan balita. Kader posyandu dituntut secara aktif untuk membantu upaya pencegahan kasus stunting. Kader posyandu memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, maka dari itu kader posyandu dituntut aktif untuk mendeteksi secara dini status gizi balita. Hal ini secara langsung dapat mempengaruhi keberhasilan upaya pencegahan stunting. Menurut Desmawati (2018), peran ibu dalam perkembangan balita sangat berpengaruh, ibu merupakan orang pertama dan utama dalam proses perkembangan anak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peran dan tugas kader posyandu adalah sebagai pelayan kesehatan, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan, penggerak dan pemberdaya masyarakat, dan pemantauan kesehatan masyarakat. Peran-peran tersebut akan dibahas sebagai berikut.

a) Pelayanan Kesehatan



Pembangunan kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Budioro, 2001 dalam Fitri, 2011). Pembangunan sektor kesehatan diarahkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar terutama bagi ibu dan anak (Rust et.al., 2009). Kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan posyandu. Kegiatan posyandu dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan kader posyandu.

Tugas kader posyandu sebagai pelayan kesehatan secara garis besar adalah mendampingi petugas kesehatan puskesmas. Kader posyandu melakukan deteksi dini pencegahan kasus stunting. Deteksi dini dilakukan dengan mencatat hasil penimbangan balita dengan menggunakan sistem lima meja. Sistem lima meja terdiri dari meja pendaftaran, meja penimbangan balita, meja pencatatan hasil penimbangan balita, meja penyuluhan perorangan, dan meja pemberian makanan tambahan. Pencatatan hasil penimbangan balita akan dilihat dan dipelajari oleh kader posyandu dan dicatat dalam buku Kartu Identitas Anak (KIA), kartu kendali posyandu, dan buku induk posyandu. Kader posyandu bertugas melapor kepada petugas kesehatan apabila ditemukan kasus-kasus baru mengenai stunting, dan selanjutnya akan dirujuk dan ditangani langsung oleh pihak puskesmas. Dalam hal ini kader posyandu belum memanfaatkan secara maksimal penggunaan alat dalam kegiatan posyandu. Kader posyandu cema Kelurahan Ngijo, belum menggunakan fasilitas buku KIA dan kartu KMS secara maksimal. Pemanfaatan kartu KMS menjadi suatu hal yang sangat penting. Dalam kartu KMS,

Sebagai pelayan kesehatan, kader posyandu belum dibekali oleh pelatihan-pelatihan yang memadai. Pelatihan-pelatihan kader posyandu dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam melakukan kegiatan posyandu, khususnya upaya pencegahan kasus stunting. Menurut Shofwan (2018), dalam mempermudah pencatatan dan pengendalian data, stake holder pada puskesmas diharuskan memiliki aplikasi database agar pencatatan data dapat dimudahkan. Peningkatan keterampilan kader posyandu yang meliputi pengetahuan dan keterampilan perlu ditingkatkan (Sukiarko, 2007 dalam Fitri, 2011). Peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan kader berguna untuk bekal dalam melaksanakan program pemerintah. Peningkatan keterampilan kader harus ditingkatkan dan dilakukan secara berkala.

b) Sosialisasi dan Penyuluh Kesehatan

Salah satu tugas dan peran kader posyandu adalah sebagai penyuluh kesehatan. Penyuluhan kesehatan adalah penyampaian informasi dari sumber informasi kepada seseorang atau kelompok orang mengenai kesehatan (Sagita, 2017). Tugas kader posyandu salah satunya yaitu menjadi sumber informasi utama mengenai kesehatan dan gizi balita pada saat pelaksanaan posyandu (Nurbaya, 2022). Kader posyandu bertugas untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan dan gizi balita. Pengetahuan yang baik mengenai gizi dan upaya pencegahan stunting dapat menjadi bekal kader posyandu dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Berdasarkan buku Panduan Orientasi Kader Posyandu yang diterbitkan oleh Kemenkes RI menyebutkan bahwa kader posayndu perlu memahami dengan baik 4 materi utama yaitu materi stunting, 1000 HPK, konsep STBM, dan materi tentang pemantauan tumbuh kembang (Kemenkes RI, 2019). Penyuluhan kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Kelurahan Ngijo, dilakukan dengan penyuluhan perorangan dan penyuluhan kelompok. Penyuluhan perorangan dilakukan pada saat kegiatan posyandu secara tatap muka. Penyuluhan perorangan diberikan sesuai dengan keadaan atau permasalahan ibu dan balita. Menurut kader posyandu, penyuluhan perorangan biasanya mengenai masalah berat badan balita dan pentingnya pemberian makanan yang bergizi. Kader posyandu akan berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan gizi yang dialami oleh balita. Solusi-solusi yang diberikan ini berupa penambahan gizi pada makanan, vitamin-vitamin, dan pemberian obat cacing. Penyuluhan perorangan ini belum mencakup mengenai kejadian stunting, faktor penyebab, dan cara menanggulangnya dikarenakan kader posyandu tidak menangani kasus stunting di Kelurahan Ngijo.

Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat juga dilakukan dengan penyuluhan kelompok. Penyuluhan kelompok adalah penyuluhan yang dilakukan kader posyandu kepada masyarakat, khususnya ibu dan balita. Menurut kader posyandu, penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader posyandu hanya mendampingi saja. Penyuluhan dilakukan satu bulan sekali. Kader posyandu melakukan penyuluhan kelompok hanya dengan menggunakan pesan singkat melalui *WhatsApp* yang berisi menu makanan bergizi. Menu makanan bergizi yang diberikan oleh petugas kesehatan puskesmas dan diharapkan kader posyandu menerapkan dalam pemberian makanan tambahan balita. Hal ini menjadi tidak efektif dikarenakan penyuluhan hanya bersifat satu arah saja.

Peran kader sebagai penyuluh kesehatan dapat dimaksimalkan dengan menggunakan berbagai media, akan tetapi para kader posyandu masih belum memaksimalkan penggunaan media sosialisasi. Penjelasan yang diberikan diharapkan juga dapat diterima oleh ibu dan balita. Kader posyandu selama ini belum melakukan penyuluhan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) karena beberapa masyarakat masih belum mengenal pentingnya buku KIA, terjadi pada posyandu cemara yang masih belum memanfaatkan buku KIA. Buku KIA dapat digunakan untuk mengingatkan ibu mengenai peningkatan berat badan balita pada bulan yang berikutnya. Dalam buku KIA juga terdapat banyak informasi-informasi yang penting dan dapat dijadikan sebagai materi penyuluhan. Pengisian KMS dalam buku KIA harus dilakukan dengan akurat dan benar. Keberhasilan pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu bergantung kepada pengetahuan, perilaku, dan sikap kader dalam melakukan penimbangan balita dengan baik dan akurat (Ayubi (2021) dalam Nurbaya, 2022). Menurut kader posyandu, kegiatan posyandu dilakukan dengan datang lalu pergi sehingga menyebabkan kader posyandu kesulitan memberikan informasi, hal ini juga seharusnya dibenahi karena pentingnya informasi-informasi kesehatan dari petugas kesehatan. Kader posyandu juga dapat ditingkatkan melalui pelatihan dasar dan penyegaran dalam kegiatan posyandu, karena selama ini kader posyandu hanya diberikan pelatihan secara konvensional, yaitu pelatihan yang diberikan secara ceramah dan tanya jawab, dalam hal ini penyuluhan juga dilakukan dengan cara yang konvensional juga (Triyanti, dkk, 2017). Salah satu kelemahan metode konvensional adalah hanya meningkatkan pengetahuan, tidak meningkatkan keterampilan, sehingga masih dirasa kurang dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

c) Penggerak dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas dan peran kader berikutnya sebagai penggerak dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai penggerak dan pemberdaya masyarakat, kader posyandu belum melakukan banyak hal secara aktif dan nyata. Menurut Sagita (2017) penggerakan dan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengorganisasian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan mengupayakan mencari solusi dari masalah tersebut. Dukungan dari tokoh masyarakat juga akan sangat berpengaruh dalam penggerakan dan pemberdayaan pada masyarakat (Malik, 2017). Dalam hal ini, kader posyandu dapat membantu dan memobilisasi masyarakat dan membangun kemampuan lokal dalam bidang kesehatan. Menurut Dikson, dkk (2017), kader posyandu diharapkan menyediakan informasi bagi pejabat kesehatan berwenang yang mungkin tidak dapat berkomunikasi secara langsung, serta mampu mendorong para pejabat kesehatan untuk mampu mendorong dan merespon kebutuhan masyarakat. Selain itu, ada beberapa tindakan untuk mengurangi stunting adalah dengan membutuhkan perbaikan dalam ketahanan pangan dan gizi, pendidikan, WASH (intervensi air, sitasi, dan kebersihan), kesehatan, pengentasan kemiskinan dan status perempuan (Malik, dkk. 2021).

Tugas kader dalam melakukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat meliputi kerjasama dengan pejabat dan petugas kesehatan dalam penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penerapan PHBS ini dilakukan dengan tujuan menjaga masyarakat dari masa pandemi covid-19. Penerapan PHBS dilakukan dengan petugas yang disebut Dawis. Petugas Dawis bekerjasama dengan Ketua RT untuk menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan



kebersihan. Dari hal tersebut, kader posyandu belum memiliki tanggung jawab dalam memobilisasi masyarakat. Kader posyandu belum secara aktif dan nyata membangun pemberdayaan masyarakat melalui kesehatan. Keterampilan kader posyandu perlu ditingkatkan mengingat kader posyandu merupakan oknum yang paling dekat dengan seluruh lapisan masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi segala macam permasalahan kesehatan. Pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dilakukan dengan pembinaan kelestarian oleh masyarakat bersama pemerintah desa/kelurahan dan pendamping teknis sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berlangsung secara berkesinambungan (Kementrian Kesehatan RI, 2019)

d) Pemantauan Kesehatan

Selain beberapa tugas dan peran kader yang disebutkan, kader posyandu memiliki peran sebagai pemantau kesehatan ibu dan balita. Bentuk pemantauan yang dilakukan kader posyandu antara lain kunjungan rumah dan pemantauan gizi balita. Kader posyandu melakukan kunjungan rumah apabila terdapat balita yang tidak mengikuti kegiatan posyandu selama tiga kali berturut-turut. Pemantauan kehadiran ini dilakukan agar orangtua balita mengerti dan sadar pentingnya hadir dalam kegiatan posyandu.

Pemantauan kesehatan balita dilakukan dengan kontrol buku kendali dan Kartu Menuju Sehat (KMS) balita. Implementasi pemantauan KMS balita belum sepenuhnya dilakukan, hal ini terjadi karena ada beberapa ibu yang melahirkan tidak di rumah sakit dan tidak mengeluarkan buku KMS, hal ini terjadi di posyandu cemara. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi petugas lapangan kesehatan, karena KMS merupakan alat untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan balita. Dalam KMS, terdapat grafik yang dapat menunjukkan status gizi balita, apakah balita sudah baik, cukup, atau kurang dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kader posyandu mengganti KMS dengan buku induk milik kader posyandu. Buku induk kader posyandu hanya bisa diketahui oleh kader posyandu, sehingga dapat menyebabkan ibu tidak sepenuhnya memperhatikan tumbuh kembang balita. Dalam pelaksanaannya, terdapat juga posyandu yang menggunakan dua buku untuk memantau tumbuh kembang balita, yaitu posyandu sehat gebyok. Posyandu sehat gebyok menggunakan KMS dan buku kendali. Menurut kader posyandu sehat gebyok, kartu kendali digunakan untuk mempermudah orangtua dalam memantau tumbuh kembang balita.

Hambatan dan Solusi upaya pencegahan stunting

Pelaksanaan kegiatan posyandu akan berjalan dengan baik apabila kader posyandu, petugas kesehatan, dan masyarakat saling bekerjasama. Peran kader posyandu diharapkan dapat berjalan dengan maksimal, apabila kurang dilaksanakannya peran kader posyandu tersebut dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung bagi anak, pemantauan tumbuh kembang yang kurang baik menyebabkan tidak termonitornya kesehatan anak, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan tumbuh kembang seperti masalah gizi buruk yang selalu ditemukan (Kemenkes RI (2012) dalam Triyanti, dkk, 2017). Peran kader posyandu dalam upaya peningkatan status gizi balita merupakan hal yang sangat penting guna mendukung program pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting. Pelaksanaan upaya penanggulangan stunting, kader posyandu banyak menemukan hambatan di lapangan. Adapun faktor penghambatnya sebagai berikut.

1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
2. Kurangnya motivasi kader posyandu
3. Pendanaan

Menurut Departemen Kesehatan RI, 2011 dalam Candra, 2018, tugas untuk perencanaan berbagai kegiatan yang ada pada posyandu, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan posyandu, serta melaporkan kegiatan posyandu dilakukan oleh kader posyandu. Melihat dari hal tersebut, kegiatan posyandu akan berjalan dengan maksimal apabila para kader posyandu aktif

dalam pelaksanaan posyandu. hal tersebut dikarenakan kader posyandu menjadi motivator yang tepat untuk membantu mewujudkan kesehatan ibu dan balita.

Kader posyandu memiliki peran yang besar terhadap lancarnya proses pelayanan kesehatan ibu dan balita dalam upaya pencegahan stunting. Namun beberapa hal dapat menjadi penyebab keberadaan kader posyandu menjadi tidak jelas atau labil. Labilnya keberadaan kader ini disebabkan oleh partisipasi kader yang bersifat sukarela sehingga tidak menjamin bahwa kader akan tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Menurunnya kinerja kader posyandu diakibatkan karena kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu. Menurut Notoatmodjo (2014), faktor pendorong dari tokoh masyarakat, keluarga, pemerintah, dan sikap petugas kesehatan dapat mendukung kelancaran kegiatan posyandu. Pemerintah perlu meningkatkan formalitas kader posyandu agar jelas kedudukannya. Pemerintah juga harus memberikan dorongan kepada kader posyandu agar terus aktif dalam menjalankan tugasnya. Apabila memungkinkan, kader posyandu diberikan penghargaan berupa upah atau gaji yang diberikan. Insentif dapat menjadikan daya tarik orang tinggal dalam suatu organisasi. Insentif juga menjadi dukungan materil dan non materil dan kader posyandu akan merasa lebih dihargai bila mendapatkan dukungan finansial tetapi kader posyandu pada umumnya menerima dengan ikhlas. Hal ini juga dapat menjadi alasan kurangnya motivasi kinerja kader posyandu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Yuliatmi (2016) mengatakan bahwa di Puskesmas Mengwi I Kabupaten Badung bahwa kinerja dengan jumlah 40,5% dalam kategori baik dan kinerja dengan jumlah 59,5% masih memiliki kinerja kurang yang berarti mereka belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara kurang baik. Rendahnya kinerja kader posyandu kemungkinan disebabkan oleh minat untuk menjadi kader sangat rendah karena pekerjaan sebagai kader posyandu didasari sukarela dan tidak memiliki ikatan yang kuat untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Mardiyah, 2021).

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam kegiatan posyandu. Sarana dan prasarana yang tersedia memang belum dapat mencakup kegiatan posyandu. Ketersediaan sarana posyandu didefinisikan sebagai segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan kader posyandu (Arwinda, 2014). Alat-alat yang digunakan posyandu di Kelurahan Ngijo berupa timbangan injak, timbangan gantung, dan alat pengukur tinggi badan. Sarana lain yang digunakan misalnya meja, kursi, kursi tunggu, dll masih meminjam dari rumah-rumah warga.

Tempat yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai informasi gizi juga meminjam rumah warga. Sosialisasi dan penyuluhan dalam upaya peningkatan pemenuhan gizi memerlukan tempat yang luas dan nyaman agar informasi juga dapat diterima dengan baik. Harapannya, sarana dan prasarana dalam kegiatan posyandu lebih ditingkatkan dan diberikan sebuah tempat yang layak seperti aula agar ibu, balita, kader posyandu juga merasa aman dan nyaman.

Hambatan kegiatan posyandu dalam pencegahan kasus stunting yang terakhir mengenai pendanaan. Posyandu sebagai lapisan bawah dalam masyarakat yang bertugas menciptakan masyarakat yang sehat hendaknya lebih diperhatikan mengenai masalah pendanaan. UU Desa No.6 tahun 2016 dan Permendes No.5 tahun 2015 menggariskan bahwa penggunaan dana desa selain digunakan untuk infrastruktur, juga harus diprioritaskan dalam pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Selain itu, dalam Permendes No.19 Tahun 2017 dalam buku saku desa dalam penanganan stunting diperjelas bahwa prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Kader posyandu dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaan di lapangan, kader posyandu banyak menciptakan ide-ide makanan tambahan yang murah guna melengkapi gizi balita.



Implementasi di lapangan, kader posyandu juga memanfaatkan dana swadaya dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, yang dimana dana swadaya tersebut tidak banyak jumlahnya.

Kader posyandu merupakan tenaga sukarela yang tidak mendapat upah atau gaji ketika melaksanakan suatu program kesehatan. Dalam upaya pencegahan stunting, kader posyandu merasa belum memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya meningkatkan pendanaan bagi pelaksanaan kesehatan melalui kegiatan posyandu. Pendanaan juga yang memadai dapat dialokasikan dengan berbagai macam peralatan dan pemberian makanan tambahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kader posyandu memiliki empat peran dalam upaya pencegahan kasus stunting di Kelurahan ngijo. Keempat peran tersebut adalah sebagai pelayan kesehatan, penyuluh kesehatan, penggerak dan pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan peran, kader posyandu didampingi oleh petugas lapangan atau petugas kesehatan dari Puskesmas Sekaran. Kader posyandu belum melakukan tugas dan peran secara maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan kader posyandu dan minimnya pelatihan-pelatihan program bagi kader.

Faktor penghambat yang mempengaruhi peran kader posyandu dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya motivasi kader, sarana dan prasarana, dan pendanaan. Kurangnya motivasi kader dikarenakan partisipasi kader yang bersifat sukarela dan belum memiliki formalitas kedudukan yang jelas. Faktor sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat pada seluruh posyandu, dikarenakan kurangnya fasilitas tempat dan alat yang kurang memadai sehingga menyebabkan kurangnya keefektifan program pencegahan kasus stunting. Selain itu, terdapat faktor pendanaan yang banyak dikeluhkan oleh para kader posyandu, pendanaan ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan posyandu, seperti dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT) guna mendukung peningkatan gizi bagi balita.

REFERENSI

- Adistie, Fanny dkk. (2018). Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Deteksi Dini Stunting dan Stimulasi Tumbuh Kembang Balita. *MKK Journal*, vol. 1 no.2.
- Cahyati, WH; Prameswari, GN; Wulandari, C; Kamowo, K. (2019). Kajian Stunting di Kota Semarang. *Jurnal RIPTEK*, Vol.3 No.2, 101-106.
- Dikson, Andy., Suprojo, Agung., & Adiwidjaja, I. (2017). Peran Kader Posyandu Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. ISSN. 2442-6962 Vol.6 No.1.
- Fitri M, Hilda; Mardiana. (2011). Keterampilan Kader Posyandu Sebelum dan Sesudah Pelatihan. *Jurnal KEMAS 7*. ISSN 1858-1196
- Mardhiyah, Aina; Arif Wijaya; Faishol Roni. (2021). Hubungan Motivasi dengan Kinerja Kader Posyandu. *jurnal keperawatan Vol. 19 No.1*. p-ISSN 2088-2173 e-ISSN 2580-4782
- Megawati, Gina; Wiramiharja, Siska. (2019). Peningkatan Kader Posyandu dalam Mendeteksi dan Mencegah Stunting di Desa Cipancing Jatinagor. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Vol. 8 No. 3*, 154-159. ISSN 1410-5675.
- Muryadi, Agustanico Dwi. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS*. ISSN: 2442-3874 Vol.3 No.1
- Nuari, NA., Sari, MK., & Aini, EN. (2020). Optimalisasi Peran Kader Laktasi Berbasis *Lactation Training* sebagai Penunjang Keberhasilan ASI. *Jurnal Soma*. P-ISSN: 2252-584x. E-ISSN: 2614-1531
- Nugroho, MR; Sasongko, RN; Kristiawan, Muhammad. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol.5 No.2 ISSN: 2549-8959 e-ISSN 2356-1327.

- Nurbaya; Rahmat; Zaki Irwan. (2022). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader Posyandu Melalui Kegiatan Edukasi dan Simulasi. *Jurnal masyarakat mandiri Vol. 6 No. 1*. e-ISSN 2614-5758 p-ISSN 2598-8158
- Profita, Arina Candra. (2018). Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Keaktifan Kader Posyandy di Desa Pangadegan Kabupaten Banyumas. *Jurnal administrasi Kesehatan Indonesia vol 6 No.2*
- Purwanti, Rachma. (2019). Program GASTIZI 1000 Dalam Meningkatkan Kapasitas Kader Posyandu. *Jurnal AcTion: Aceh Nutrition Journal*. P-ISSN: 2527-3310. E-ISSN: 2548-5741.
- Satiti, IAD., & Amalia, W. (2020). Optimalisasi Peran Kader dalam Program “Generasi Bebas Stunting”. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*. E-ISSN 2548-3463 Vol. 5 No. 1.
- Sengkey, Sriyatty W. (2016). Analisis Kinerja Kader Posyandu di Puskesmas Paniki Kota Manado. *JIKMU Vol. 5, No. 2b*.
- Setyowati, Vilda Ana Veria. (2018). *Kajian Stunting Berdasar Umur dan Jenis Kelamin di Kota Semarang*. The 7th University Research Colloquium. Semarang.
- Sistiarani, Colti; Nurhayati, S; Suratman. (2013). Peran Kader dalam Penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. ISSN 1858-1196
- Subagyo, Widyo; Mukhadiono; Wahyuningsih, Dyah. (2015). Peran Kader dalam Memotivasi Balita Berkunjung ke Posyandu. *Jurnal Keperawatan Soedirman Vol 10 No.3*
- Ramdhani, Awa; Handayani, Hani; Setiawan, Asep. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Stunting. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. Vol.2 ISSN: 2963-2145.
- Triyanti, Mimin; Widagdo, Laksmono; Syamsulhuda. (2017). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu dengan metode BBM dan Mind Mapping (MM). *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 12 No. 2*.
- Yanti; Mulyadi; Usman, Said. (2019). Pengetahuan, Dana Insentif, Sarana dan Prasarana dengan Kader dalam Pelaksanaan Posyandu. *jurnal Ilmu Keperawatan*. ISSN: 2338-6371